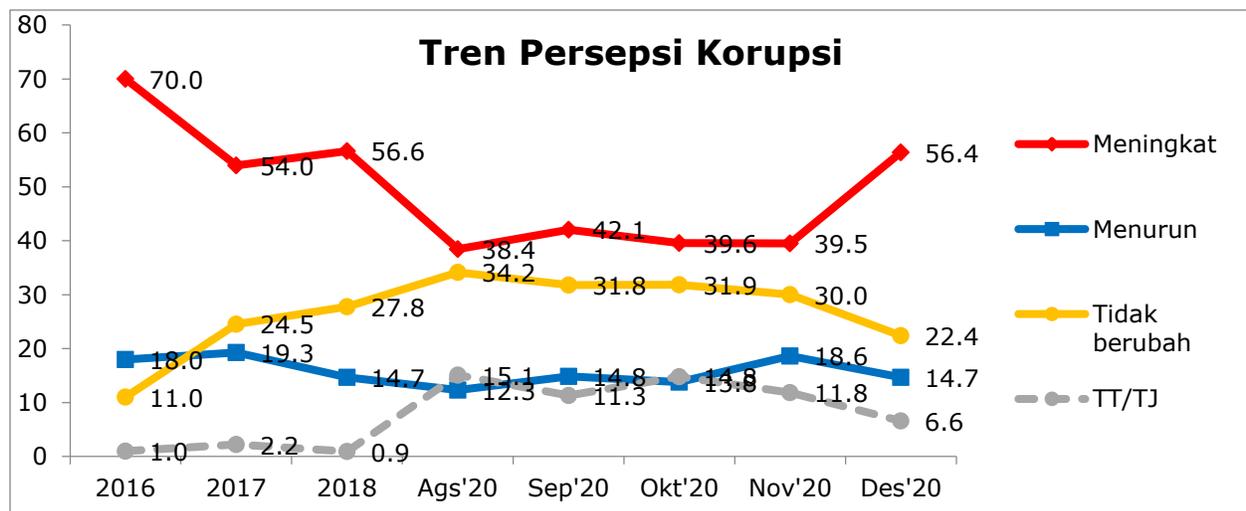


## Public Release

Sebagai lanjutan dari Survei Nasional LSI tentang Tren Persepsi Korupsi di Masa Wabah COVID-19 yang telah dirilis pada 3 November 2020 lalu, kini LSI merilis temuan lanjutan dari survei tersebut. Temuan lanjutan ini adalah hasil survei dengan topik dan metode yang sama yang dilakukan pengambilan datanya pada 15-18 November dan 15-18 Desember 2020. Terdapat temuan penting dari tren persepsi korupsi, kepercayaan akan penggunaan anggaran penganggulangan dampak wabah, dan kepercayaan pada lembaga pemerintah. Tren terakhir ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan terakhir tentang kasus korupsi Bansos yang melibatkan Menteri dan jajaran Kementerian Sosial. Hasil survei dapat disimak lebih lanjut berikut ini.

Tingkat korupsi di Indonesia saat ini dinilai makin meningkat oleh mayoritas warga, 56.4%. Sementara yang menilai tingkat korupsi sama saja atau mengalami penurunan, atau tidak bisa menilai, makin sedikit. Artinya mayoritas warga yakin bahwa tingkat korupsi saat ini semakin tinggi. Dalam sebulan terakhir, jumlah yang menilai 'meningkat' naik secara tajam.

**Gambar I. Tren Persepsi Korupsi (%)**



*P: Dalam dua tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu/Bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan?*

Pada masa wabah COVID-19 ini, warga masih mengakses beberapa layanan publik meski sedikit. Yang paling banyak diakses adalah mengurus administrasi (KTP, KK, Akta Kelahiran), 11%. Terdapat di bawah 10% warga yang berhubungan langsung dengan pegawai pemerintah untuk mengurus SIKM (5%), surat bebas COVID-9 (6%), berurusan dengan polisi (3%), dan berobat atau mengantarkan berobat keluarga terkait COVID-19 (3%).

Di antara yang pernah berhubungan langsung pada empat urusan tersebut, terdapat cukup banyak warga yang diminta uang/hadiah di luar biaya resmi, yakni pada saat mengurus SIKM (23%), surat bebas COVID-9 (13%), saat berurusan dengan polisi (22%), dan ketika berobat atau mengantarkan anggota keluarga untuk berobat terkait COVID-19 (13%). Hal ini patut menjadi perhatian karena dalam kondisi wabah, warga masih mengalami pungutan tidak resmi dalam mengakses layanan publik.



Saat ini, proporsi warga yang menilai bahwa ekonomi nasional sekarang buruk dan sangat buruk sebanyak 55.6%. Sedangkan yang menilai baik dan sangat baik 11.9%. Sementara yang menilai sedang 29.4%. Meski masih mayoritas, namun penilaian bahwa kondisi ekonomi nasional yang buruk dan sangat buruk ini cenderung turun. Khususnya jika dibandingkan dengan temuan survey September 2020 lalu, yang menilai kondisi ekonomi Indonesia buruk berada di angka 74.2% dan yang menilai baik hanya 5.5%. Kemudian dalam tiga bulan, sejak Oktober, tren yang menilai buruk cenderung turun. Pada Oktober 2020 lalu, 62.4% menilai buruk, kemudian turun menjadi 59.7% pada November, sebelum turun lagi menjadi 55.7% di bulan Desember.

Selain kondisi ekonomi nasional, survei (*Track Poll*) ini juga menanyakan tentang kondisi ekonomi rumah tangga. Hasil survei pada Desember 2020 ini menunjukkan bahwa mayoritas warga, 71%, menjawab bahwa pendapatan rumah tangganya sekarang ini menurun dibanding sebelum adanya imbauan pemerintah bekerja dan belajar dari rumah (untuk mencegah penyebaran virus Corona). Namun demikian, sebagian kecil warga tampak mulai ada yang merasakan kenaikan tingkat pendapatan saat ini, sebanyak 6%. Angka ini menunjukkan perubahan dalam sebulan terakhir. Mereka yang menilai bahwa pendapatannya rumah tangganya turun sekitar 79%, dan menjawab bahwa pendapatan rumah tangganya naik hanya 1% pada November 2020 lalu.

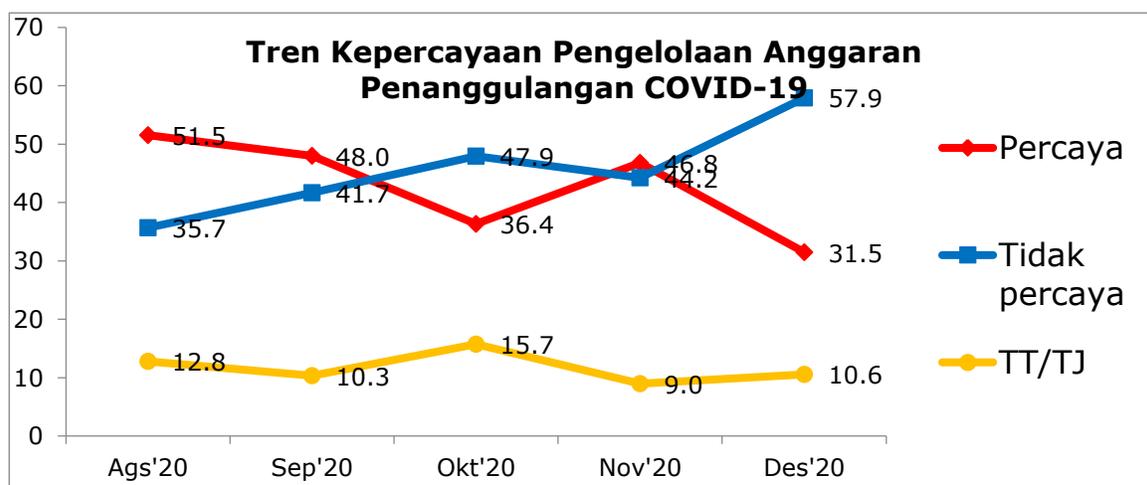
Bagi warga yang menurun pendapatannya, mayoritas 73% mengaku penurunan pendapatannya cukup atau sangat banyak. Tren ini relatif tidak banyak berubah dibanding temuan survei-survei sebelumnya.

Saat ini, mayoritas 68.9% warga puas dan sangat puas atas kinerja Presiden menangani wabah COVID-19. Sedangkan mereka yang kurang atau tidak puas sekitar 28.9%.

Temuan survei pada Desember 2020 ini relatif tidak berubah jika dibandingkan dengan temuan survei sejak Agustus 2020 lalu. Meski mayoritas, namun kepuasan terendah pada survei Oktober 2020 lalu yakni sebanyak 57.9%.

Hasil *Track Poll* 5 pada Desember 2020 menunjukkan bahwa mayoritas publik 57.9% tidak percaya atau sangat tidak percaya bahwa anggaran penanggulangan dampak COVID-19 tidak disalahgunakan. Sedangkan yang percaya atau sangat percaya lebih sedikit, 31.5%.

**Gambar 2.** Tren Kepercayaan terhadap Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Program



*P: Pemerintah telah menganggarkan 600 hingga 900 triliun rupiah untuk berbagai program penanggulangan dampak virus Corona/COVID-19. Seberapa percaya Ibu/Bapak bahwa anggaran tersebut tidak akan disalahgunakan (dikorupsi, diselewengkan)?*

## Penanggulangan Dampak COVID-19

Apabila dilihat sejak *Track Poll 1* pada Agustus 2020, maka tampak tren kepercayaan ini tampak fluktuatif. Kepercayaan tertinggi adalah pada *Track Poll 1* Agustus 2020, yakni mayoritas 51.5% percaya, sedangkan yang tidak percaya sebanyak 35.7%. Setelah itu, tren kepuasan cenderung turun. Pada *Track Poll 2* September 2020 sebesar 48% yang percaya, dan hanya 36.4% yang percaya pada *Track Poll 3* Oktober 2020. Tren ini sempat naik pada *Track Poll 4* November 2020, sebanyak 46.8% percaya. Namun, pada *Track Poll 5* Desember 2020, kepercayaan anjlok mencapai titik terendah di 31.5%.

Mayoritas 54.8% pada *Track Poll 5* menyatakan bahwa mereka menerima bansos atau bantuan lain tersebut. Sedangkan 45.2% menyatakan tidak menerima bansos. Dalam lima bulan, angka penerima bansos atau bantuan lain terkait COVID-19 ini relatif tidak berubah.

*Track Poll* ini juga menanyakan kepada yang menerima bantuan, berasal dari manakah bantuan yang mereka terima tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa bantuan terutama berasal dari Kementerian atau Pemerintah Pusat, dan dari Pemerintah Daerah. Terutama pada *Track Poll 5* Desember 2020, bantuan lebih banyak berasal dari Kementerian atau Pemerintah pusat 57%. Sementara dari Pemerintah Daerah sekitar 44%. Pada *Track Poll 1* Agustus 2020, sempat cukup banyak bantuan yang berasal dari Dana Desa, namun setelahnya tidak banyak.

Mayoritas 80.8% menyatakan bahwa desa/kelurahan mereka menerima bansos atau bantuan lain terkait COVID-19. Angka ini relatif sama pada kelima *Track Poll* sejak Agustus hingga Desember 2020. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan sosial atau bantuan lain terkait COVID-19 tersebar luas di berbagai wilayah di Indonesia.

Sama dengan bantuan sosial yang diterima secara perseorangan, kebanyakan bansos di desa/kelurahan diberikan oleh Kementerian atau Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Pada *Track Poll 5*, dari desa/kelurahan yang menerima bansos, 68% berasal dari Kementerian atau Pemerintah Pusat. Sementara 56% dari Pemerintah Daerah.

Hasil *Track Poll 5* menunjukkan bahwa apabila bansos diberikan kepada yang mendaftar, sekitar 67.2% menjawab akan mendaftar, sedangkan yang tidak sebesar 29.3%. Jumlah ini relatif tidak berubah selama lima kali *Track Poll*. Jumlah ini juga lebih besar daripada yang menerima bansos. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat warga yang sebetulnya ingin atau membutuhkan bansos tetapi tidak menerimanya.

Selanjutnya, bagi mereka yang mau mendaftar, survei ini menanyakan alasan mengapa mereka mau mendaftarkan diri. Mayoritas menjawab bahwa mereka memerlukan bantuan sosial dari pemerintah, sebanyak 67.4% pada *Track Poll 5* Desember 2020. Selain itu, cukup banyak yang menjawab bahwa mereka terkena dampak ekonomi COVID-19, sebanyak 26.8%.

Selanjutnya, survei ini juga menanyakan tentang minat untuk terlibat dalam penentuan penerima bansos. Apakah publik ingin dilibatkan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan apabila kesempatan tersebut dibuka. Cukup banyak yang berminat, sekitar 41.9% pada *Track Poll 5* dan angka ini relatif sama terutama sejak *Track Poll 2* September 2020. Sementara yang tidak ingin dilibatkan masih mayoritas, 57.8% pada *Track Poll 5*. Yang tidak ingin dilibatkan ini juga relatif tidak berubah sejak *Track Poll 2* September 2020. Pola yang berbeda tampak pada *Track Poll 1* Agustus 2020. Saat itu mayoritas 52.8% mau dilibatkan, dan 47.1% tidak ingin dilibatkan. Namun pola tersebut berubah sejak *Track Poll 2*.

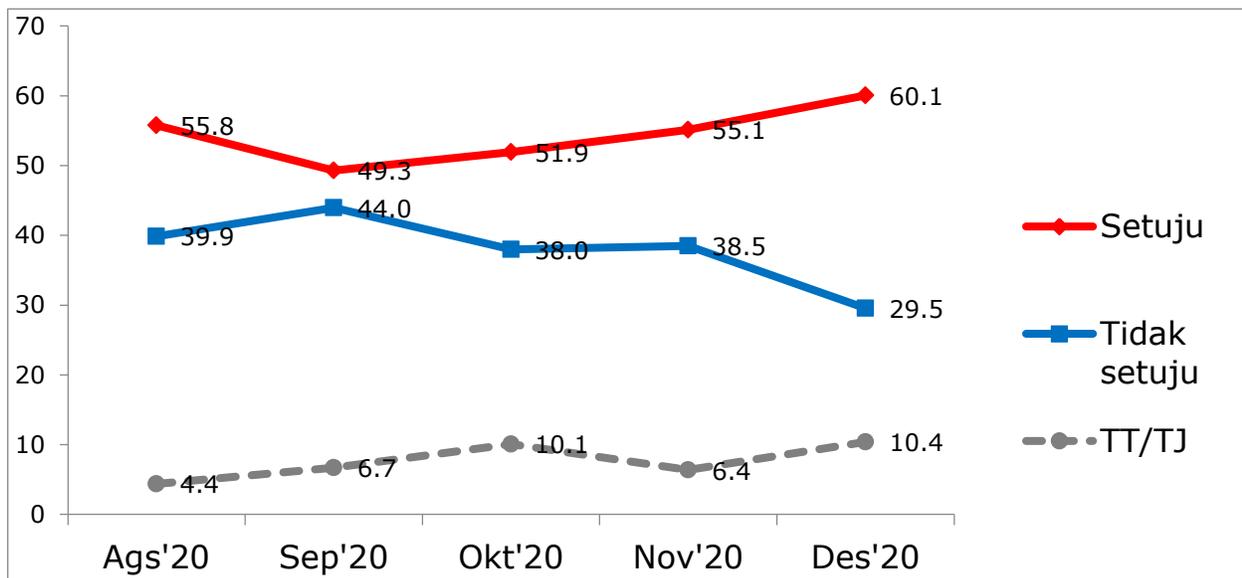
*Track Poll* juga menanyakan tentang persepsi publik mengenai distribusi bansos. Apakah menurut mereka penerima bansos kebanyakan memiliki koneksi dengan orang yang berkuasa menentukan penerima bansos. Pada *Track Poll 5* Desember 2020, mayoritas 60.1% setuju bahwa kebanyakan memiliki koneksi



dengan orang yang berkuasa menentukan penerima bansos. Sementara yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut lebih sedikit, 29.6%.

Jika dilihat tren sejak *Track Poll 2* hingga *Track Poll 5*, tampak bahwa semakin banyak yang setuju bahwa penerima bansos kebanyakan memiliki koneksi dengan orang yang berkuasa menentukan penerima bansos. Dan sebaliknya, semakin sedikit yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Hal ini patut diperhatikan karena mengindikasikan adanya penyimpangan di lapangan.

**Gambar 3.** Penerima Bansos Kebanyakan Orang yang Punya Koneksi dengan Orang yang Berkuasa



*P: Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju dengan Penerima bansos kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki koneksi dengan orang yang berkuasa untuk menentukan siapa yang menerima bansos?*

#### Menentukan Penerima Bansos

Temuan tersebut diperkuat dengan jawaban atas pertanyaan berikutnya. Sejak November 2020, *Track Poll* ini menanyakan apakah responden percaya bahwa penyaluran bansos tidak tepat sasaran karena penerimanya kebanyakan warga yang memiliki hubungan dengan penyalur bansos. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas cenderung percaya dengan pendapat tersebut. Pada *Track Poll 5* Desember 2020, sekitar 63.9% yang percaya. Angka ini stabil dari November 2020, sekitar 61.4%.

Berbagai temuan survei atas persepsi mengenai pelaksanaan penyaluran bansos di atas lebih lanjut penting untuk diketahui hubungannya dengan kepercayaan terhadap lembaga terkait pengawasan bantuan COVID-19. Survei ini juga menanyakan kepercayaan publik terhadap beberapa lembaga dalam mengawasi bantuan penanganan COVID-19.



Pada *Track Poll* 5 Desember 2020, kepercayaan tertinggi adalah pada Presiden. Mereka yang sangat dan cukup percaya pada Presiden sekitar 85%. Selanjutnya, publik juga memiliki kepercayaan yang tinggi pada KPK, sekitar 79%, Pemerintah Kabupaten/Kota 80%, Pemerintah Provinsi 76%, Pemerintah desa/kelurahan 76%, dan Gugus Tugas COVID-19 75%. Lembaga-lembaga lain masih di bawah kepercayaan terhadap lembaga-lembaga tersebut. Tren kepercayaan menunjukkan perkembangan yang penting. Tren kepercayaan pada presiden stabil. Sedangkan kepercayaan kepada KPK cenderung naik. Sementara kepada Polisi dan Pemerintah Provinsi fluktuatif dengan kecenderungan turun pada *Track Poll* 5 ini jikadibandingkan pada *Track Poll* 4 November 2020. Kepercayaan turun paling tajam pada Kementerian Sosial, dari 82.5% pada November, menjadi hanya 54.1% pada Desember 2020. Penurunan ini ditengarai terjadi karena kasus korupsi yang melibatkan Menteri dan jajaran Kementerian Sosial terkait bansos COVID-19.

### Metodologi:

Survei (*Track Poll*) ini dilakukan selama lima bulan berturut-turut. Target populasi dari masing-masing survei adalah penduduk Indonesia umur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Sampel setiap survei sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada rentang Maret 2018 hingga Maret 2020. Sebanyak 206.983 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung dalam rentang 2 tahun terakhir. Secara rata-rata, sekitar 70% di antaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk ditelpon sebanyak 5.000 lebih data, dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.200 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.200 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar  $\pm 2.9\%$  pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Pengumpulan data kelima *Track Poll* dilakukan pada:

1. 13-16 Agustus 2020
2. 13-16 September 2020
3. 13-17 Oktober 2020
4. 15-18 November 2020
5. 15-18 Desember 2020

*Quality control* terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan menelepon responden terpilih. Dalam *quality control* tidak ditemukan kesalahan berarti.

Catatan: data persepsi tingkat korupsi 2016-2018 diperoleh dari survei nasional secara tatap muka. Survei 2016 diselenggarakan oleh CSIS, 2017 oleh Polling Center, dan 2018 oleh Lembaga Survei Indonesia.